

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR
PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN
BEBAS
(Studi Empiris pada KPP Pratama Sukoharjo)**



PUBLIKASI ILMIAH

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Starta I pada Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Program Studi Akuntansi

Oleh :

NOVIA ERMA MURDININGTYAS
B 200 110 183

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS
(Studi Empiris pada KPP Pratama Sukoharjo)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

NOVIA ERMA MURDININGTYAS
B 200 110 183

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si.
NIK. / NIDN : 575 / 0605086301

HALAMAN PENGESAHAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (Studi Empiris pada KPP Pratama Sukoharjo)


Oleh


NOVIA ERMA MURDININGTYAS
B 200 110 183

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 23 April 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

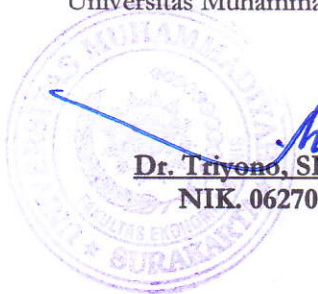
Dewan Penguji:

1. Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Zulfikar, SE., M.Si.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Atwal Arifin, Ak., M.Si.
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Dr. Triyono, SE., M.Si.
NIK. 0627016801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417 Surakarta - 57102

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOVIA ERMA MURDININGTYAS**
NIRM : **11.6.106.02030.50183**
Jurusan : **AKUNTANSI**
JudulSkripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMAUAN
MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN
PEKERJAAN BEBAS (Studi Empiris Pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dan serahkan ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti dan atau dapat dibuktikan bahwa skripsi hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan atau gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, 23 April 2016



Yang membuat pernyataan,

(NOVIA ERMAMURDININGTYAS)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 April 2016
Penulis



NOVIA ERMA MURDININGTYAS
B 200 110 183

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (Studi Empiris pada KPP Pratama Sukoharjo)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, persepsi wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak di KPP Pratama Sukoharjo.

Penelitian ini merupakan penelitian survei. Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *Accidental Sampling*, sedangkan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *slovin*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 orang wajib pajak. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah metode survey dengan menggunakan media kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian diketahui bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, persepsi wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ($p < 0,05$).

Kata kunci : Kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, persepsi wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum.

ABSTRACT

This study was aimed to analyze the effect of taxpayer awareness, knowledge and understanding of tax regulations, perception of tax system affectivity, tax services quality, taxpayer perception to the felt lease benefit, and the confidence level of the system administration and law on the willingness to pay tax individual tax payers are doing independent personal services in KPP Pratama Sukoharjo.

The research was using survey quantitative research methods with questionnaire. The population was taxpayer which doing independent what enlisted in KPP Pratama Sukoharjo. Sampling was done by the method of accidental sampling with 100 samples that determined of slovin formula. Model of data analysis used in this study was a multiple linear regression analysis.

Based on the research results show that coefficient of determination ($Adj. R^2$) of 0.398. That means 39,8% of the willingness to pay taxes influenced by taxpayer awareness, knowledge and understanding of tax regulations, perception of tax system affectivity, tax services quality, taxpayer perception to the felt lease benefit, and the confidence level of the system administration and law. The independent variable in this study taxpayer awareness, knowledge and understanding of tax regulations, perception of tax system affectivity, tax services quality, taxpayer perception to the felt lease benefit, and the confidence level of the system administration and law had a significant influence on the willingness to pay tax individual tax payers are doing independent personal services ($p < 0,05$).

Keyword: *taxpayer awareness, knowledge and understanding of tax regulations, perception of tax system affectivity, tax services quality, taxpayer perception to the felt lease benefit, and the confidence level of the system administration and law, the willingness to pay tax individual tax payers are doing independent personal services*

1. PENDAHULUAN

Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan membutuhkan dana yang relatif besar. Dana yang diperlukan semakin meningkat seiring dengan peningkatan

kebutuhan pembangunan. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal adalah pajak (Utami dan Andi, 2012).

Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bias lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbarui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun presentase terhadap seluruh pendapatan negara. Dengan demikian, diiringi dengan meningkatnya APBN dari tahun ke tahun. Sehingga memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja profesional. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha kecil menengah masih lepas dari jeratan pajak (Hardiningsih dan Pancawati, 2011).

Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *e-filing*, *e-SPT*, *eNPWP*, *e-registration*, *drop box* dan *e-banking*. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pada sektor pajak dan dapat menciptakan suatu sudut pandang yang positif terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan pada pajak itu sendiri (Setyonugroho, 2012).

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian Handayani dan Sapti (2012); Z.Probondari (2013) yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan penambahan dua variabel independen yaitu kualitas pelayanan perpajakan dan persepsi wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan, sehingga diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Sukoharjo).

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

- a. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) atau operator pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - 2) Wajib pajak bersifat positif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak (Mardiasmo, 2013).

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja. Menurut Gatot pekerjaan bebas dibagi menjadi dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli (*liberal professional service*) dan pekerjaan bebas lainnya (*other personal service*). Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara, akuntan, PPAT, dokter, notaris, arsitek, dan konsultan. Sedangkan pekerjaan bebas yang dilakukan diluar tenaga ahli adalah seperti artis, seniman, atlet, penulis, penceramah dan profesional lainnya yang bekerja secara independen bukan sebagai karyawan. (Handayani dan Agus, 2012).

Kemauan Membayar Pajak

Konsep kemauan membayar pajak menurut Tatiana dan Priyo dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Sedangkan yang kedua adalah konsep pajak. Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006). Selain itu, menurut Sanjaya menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak (Setyonugroho, 2012).

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Kemajuan dan perkembangan negara ini tak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya dengan kesadaran bernegara (Widayati dan Nurlis, 2010).

Irianto menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga Negara (Setyonugroho, 2012).

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya (Utami dan Andi, 2012).

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan

mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Wajib pajak dapat mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP serta melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam system administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional (Setyonugroho, 2012).

Berdasarkan hal tersebut diharapkan sistem perpajakan yang sekarang sudah ada seperti e-SPT, e-filling, e-NPWP, e-registration, e-banking dan drop box, dan lain-lain dapat lebih sempurna serta memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam membayar atau melaporkan kewajiban perpajakan dan dapat memberikan kemudahan pencitraan atau persepsi yang baik kepada hal yang terkait dengan pajak terutama pada sistem perpajakan (Setyonugroho, 2012).

Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain : (1) adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan eFilling. Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. (2) pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. (3) penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. (4) peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. (5) Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat (Widayati dan Nurlis, 2010).

Kualitas Pelayanan Perpajakan

Menurut Ni Luh Supadmi (2009) pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Suatu layanan dapat dikatakan baik apabila usaha yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus.

Pelayanan berkualitas yang diberikan kepada wajib pajak antara lain: Pertama, Prosedur administrasi pajak dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh semua wajib pajak, pendaftaran NPWP, adanya sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, sehingga sistem ini pelayanan prima kepada wajib pajak semakin nyata. Kedua, petugas pajak atau Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam skill knowledge, dan experience dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan, pelayanan petugas bank tempat pembayaran wajib melayani dan memberikan penjelasan terhadap wajib pajak dengan ramah agar wajib pajak benar-benar paham sesuai yang diharapkan atau diinginkan. Ketiga, KPP memberikan perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), dengan perluasan ini dapat meningkatkan pelayanan wajib pajak dengan menetapkan suatu pelayanan kepada wajib pajak tanpa harus mendatangi masing-masing seksi (Hardiningsih dan Pancawati, 2011).

Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hardiningsih dan Pancawati, 2011).

Persepsi Wajib Pajak atas Manfaat Pajak yang Dirasakan

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1999 persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari serapan atau seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya (Wulandari, 2012).

Manfaat dari pembayaran pajak yang dirasakan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kemauan penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah (Z.Probondari, 2013).

Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum

Di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dan lain-lain. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis (Handayani dan Sapti, 2012).

Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Permadi dan Tedi, 2013).

Pada penelitian James Alm *et al.* yang dilakukan di Rusia sebelum selama dan sesudah masa transisi perubahan sistem pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak karena kebanggaan nasional dan kepercayaan kepada sistem pemerintahan yang tinggi dari pemanfaatan pajak tersebut. Sedangkan dalam penelitian Henriket *et al.* yang dilakukan di Swedia mengemukakan bahwa ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap politisi terkemuka akan berpengaruh pada kemauan membayar pajak memburuk dan kemungkinan mengumpulkan pajak untuk menjaga kesejahteraan negara dikurangi.

Hubungan antara Kesadaran Membayar Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak

Kesadaran yang dimiliki oleh manusia yaitu kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran wajib pajak dalam pembayaran perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Hal paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban. Ketidakuannya wajib pajak melakukan kewajiban tersebut adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Masyarakat tidak pernah tahu wujud kongkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fikriningrum dan Muchamad (2012) Hardiningsih dan Nila (2011); Setyonugroho (2012) dan Permadi (2013) membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan:

H₁ = kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Hubungan antara Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Pengetahuan wajib pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Widayati dan Nurlis, 2010). Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Hardiningsih dan Pancawati, 2011).

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP (Hardiningsih dan Pancawati, 2011).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fikriningrum dan Muchamad (2012) Hardiningsih dan Nila (2011); Setyonugroho (2012) dan Permadi (2013) membuktikan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan:

H₂ = Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Hubungan antara Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Dengan Kemauan Membayar Pajak

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan

aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010).

Apabila Wajib Pajak sudah memaksimalkan sistem perpajakan yang baru, Wajib Pajak akan lebih dimudahkan dalam pembayaran pajaknya. Wajib Pajak hanya perlu membuka situs Ditjen Pajak dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan. Data SPT wajib pajak juga lebih aman karena tersimpan dalam bentuk elektronik dan terenkripsi (memiliki kode kunci). Selain itu, terdapat sistem pelaporan e-SPT dan e-Felling yang memudahkan dan lebih cepat Wajib Pajak dalam melaporkan pajak (Handayani dan Sapti, 2012).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hariyadi (2012) variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal senada juga diungkapkan oleh Widayati dan Nurlis (2010), Fikriningrum dan Syafrudin (2012) peneliti lainnya dimana variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan:

H₃= Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Hubungan antara Kualitas Pelayanan Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak

Menurut Hardiningsih dan Pancawati (2011) Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Dalam kondisi Wajib Pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fikriningrum dan Muchamad (2012) Hardiningsih dan Nila (2011); Setyonugroho (2012) membuktikan bahwa kualitas layanan signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan:

H₄= Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Hubungan antara Persepsi Wajib Pajak atas Manfaat Pajak yang Dirasakan dengan Kemauan Membayar Pajak

Manfaat dari pembayaran pajak yang dirasakan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kemauan penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. Adapun manfaat pajak yang dapat dirasakan wajib pajak seperti fasilitas umum yang ada seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan sarana transportasi umum, pembangunan gedung-gedung sekolah, pemberian bantuan untuk para pelajar yang berprestasi maupun kurang mampu (Z.Probondari, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan Ramadhani (2014) membuktikan bahwa Persepsi wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

H₅= Persepsi wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Hubungan antara Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum dengan Kemauan Membayar Pajak

Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Z.Probondari, 2013).

Pada penelitian James Alm *et al.* yang dilakukan di Rusia sebelum selama dan sesudah masa transisi perubahan sistem pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak karena kebanggaan nasional dan kepercayaan kepada sistem pemerintahan yang tinggi dari pemanfaatan pajak tersebut.

Penelitian Ramadhani (2014); Pratomo (2015); Fahluzy dan Linda (2014); Prahestiara, (2014) membuktikan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terbukti secara

parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan:

H₆=Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

3. METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survei (*survei research*) yaitu penelitian dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden.

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Jumlah populasi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang aktif per Desember 2015 sebanyak 23.429 orang, sampel terpilih dengan teknik *Accidental Sampling* dengan menggunakan rumus *Slovin* diperoleh sampel sebanyak 100 responden.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kemauan Membayar Pajak (Y)

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai atau tindakan moral untuk secara sukarela yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengeluarkan uang (yang sesuai dengan peraturan yang berlaku) dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan umum negara dengan tidak mendapatkan suatu timbal balik secara langsung dari Negara (Setyonugroho, 2012). Variabel ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari lima item pertanyaan kemauan bayar pajak:

1. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak
2. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak
3. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak
4. Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak
5. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

Kesadaran Membayar Pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Kemajuan dan perkembangan negara ini tidak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya dengan kesadaran bernegara (Widayati dan Nurlis, 2010). Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang terdiri dari empat item pertanyaan yaitu:

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara
2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara
3. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak (X2)

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang terdiri dari empat item pertanyaan:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak
3. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi
4. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui *training*.

Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X3)

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010).

Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. Penelitian yang dilakukan oleh Cummings dan Varquez di tahun 2005 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya. Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang terdiri dari lima item pertanyaan:

1. Pembayaran pajak melalui *e-Banking*
2. Penyampaian SPT melalui e-SPT dan *e-Filling*
3. Penyampaian SPT melalui *drop box*
4. *Update* peraturan pajak terbaru secara *online* melalui internet
5. Pendaftaran NPWP melalui *e-Register*.

Kualitas Pelayanan Pajak (X4)

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya (Hardiningsih dan Pancawati, 2011).

Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketentuan perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian sistem informasi perpajakan dan kualitas SDM yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik (Hardiningsih dan Pancawati, 2011). Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang terdiri dari 6 item:

1. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi *skill, knowledge, experience* dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan
2. Fiskus memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik
3. Perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
4. TPT dapat memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak
5. Fiskus senantiasa menjaga kerapian dalam berpenampilan, tutur katanya dengan baik, bersikap sopan, cepat dan tangkas untuk membantuy kesulitan wajib pajak
6. Sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan merupakan sistem layanan prima kepada wajib pajak menjadi semakin nyata.

Persepsi Wajib Pajak atas Manfaat Pajak yang Dirasakan (X5)

Manfaat dari pembayaran pajak yang dirasakan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kemauan penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. Adapun manfaat pajak yang dapat dirasakan wajib pajak seperti fasilitas umum yang ada seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan sarana transportasi umum, pembangunan gedung-gedung sekolah, pemberian bantuan untuk para pelajar yang berprestasi maupun kurang mampu (Z.Probondari, 2013). Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang terdiri dari enam item pertanyaan, antara lain:

1. Dengan adanya penerimaan pajak pembangunan fasilitas umum (jalan dan transportasi) menjadi bertambah baik
2. Dengan adanya penerimaan pajak, pembangunan sekolah menjadi bertambah baik
3. Dengan adanya penerimaan pajak pelayanan kesehatan menjadi lebih baik
4. Dengan adanya penerimaan pajak bantuan untuk korban bencana alam dapat tersalur dengan cepat
5. Dengan adanya penerimaan pajak tingkat keamanan menjadi lebih terjaga
6. Pajak sebagai alat pembayaran luar negeri.

Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum (X6)

Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney, et. al, 1998). Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian James, *et.al* yang dilakukan di Rusia sebelum, selama, dan sesudah masa transisi perubahan sistem pemerintahan yang terdiri dari empat item pertanyaan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator penelitian Handayani dan Agus (2012) adalah:

1. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan
2. Kepercayaan terhadap sistem hukum
3. Kepercayaan terhadap politisi
4. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.

Uji Kualitas Data

Semua instrumen kuesioner memiliki r hitung $> r$ tabel, maka semua item pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid. Sedangkan hasil analisis reliabilitas diketahui bahwa semua variabel diperoleh rata-rata nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6, maka secara keseluruhan variabel dikatakan reliabel.

Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda maka dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Hasil pengujian asumsi klasik diketahui sebaran data normal, tidak terjadi multikolinieritas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda. Persamaan yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$KMP = \alpha + \beta KSP + \beta PPP + \beta PEP + \beta KPP + \beta PWP + \beta TKSP + \epsilon$$

Dimana:

KMP = Variabel Dependen (Kemauan membayar pajak)

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X = Faktor-faktor kemauan membayar pajak

KSP = Kesadaran membayar pajak

PPP = Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

PEP = Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan

KPP = Kualitas pelayanan perpajakan

PWP = Persepsi wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan

TKSP = Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum

ϵ = Error

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis regresi linier berganda ditunjukkan pada Tabel 1. sebagai berikut ini:

Tabel 1				
Hasil Analisis Regresi Berganda				
Variabel	Standardized Coefficients B	t	Sig	Keterangan
(Constant)	0.316			
Kesadaran membayar pajak	0.187	2.624	0.010	Signifikan
Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	0.149	2.481	0.015	Signifikan
Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan	0.186	2.494	0.014	Signifikan
Kualitas pelayanan perpajakan	0.248	2.896	0.005	Signifikan
Persepsi wajib pajak atas manfaat yang dirasakan	0.110	2.536	0.013	
Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan & hukum	0.246	3.049	0.003	Signifikan
R ²	= 0,435	F hit = 11,910		
Adjusted R ²	= 0,398	F tab = 2,20		
t table	= 1,986			

Sumber : Data primer diolah 2016

Dari hasil analisis regresi berganda di atas, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,316 + 0,187X_1 + 0,149 X_2 + 0,186 X_3 + 0,248X_4 + 0,110X_5 + 0,246X_6 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier tersebut di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar 0,316 artinya tanpa adanya nilai variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, persepsi wajib pajak atas manfaat yang dirasakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan & hukum, maka kemauan membayar pajak nilainya sebesar 0,316.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran membayar pajak (X_1) bernilai positif sebesar 0,187 artinya setiap peningkatan kesadaran membayar pajak maka akan meningkatkan kemauan responden dalam membayar pajak (Y) sebesar 0,187.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X_2) bernilai positif sebesar 0,149 artinya setiap peningkatan pengetahuan dan pemahaman responden tentang peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kemauan responden membayar pajak (Y) sebesar 0,149.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X_3) bernilai positif sebesar 0,186 artinya setiap peningkatan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dari responden maka akan meningkatkan kemauan responden membayar pajak (Y) sebesar 0,186.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas pelayanan perpajakan (X_4) bernilai positif sebesar 0,248 artinya setiap peningkatan kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan pihak KPP Pratama Sukoharjo kepada responden maka akan meningkatkan kemauan responden membayar pajak (Y) sebesar 0,248.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel persepsi wajib pajak atas manfaat yang dirasakan (X_5) bernilai positif sebesar 0,110 artinya setiap peningkatan persepsi wajib pajak atas manfaat yang dirasakan maka akan meningkatkan kemauan responden membayar pajak (Y) sebesar 0,110.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan & hukum (X_6) bernilai positif sebesar 0,246 artinya setiap peningkatan tingkat kepercayaan terhadap

sistem pemerintahan & hukum maka akan meningkatkan kemauan responden membayar pajak (Y) sebesar 0,246.

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 11,910 > F_{tabel} (2,20) dengan nilai signifikannya sebesar 0,000 pada tingkat signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel-variabel independen yang meliputi kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, persepsi wajib pajak atas manfaat yang dirasakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan & hukum, mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap kemauan membayar pajak atau model regresi yang terbentuk fit untuk digunakan dalam analisis.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, persepsi wajib pajak atas manfaat yang dirasakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan & hukum mempunyai nilai signifikansi sebesar lebih kecil dari 0,05; sehingga H_0 ditolak dan H_1-H_6 diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, persepsi wajib pajak atas manfaat yang dirasakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan & hukum secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Didukung hasil koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,398. Hal ini berarti variabel-variabel independen meliputi kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, persepsi wajib pajak atas manfaat yang dirasakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan & hukum mempengaruhi kemauan membayar pajak sebesar 39,8%.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak memiliki nilai t hitung sebesar (2,624) > t_{tabel} (1,986) dengan tingkat signifikan sebesar (0,010) < α (0,05). Sehingga variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, itu berarti H_1 diterima. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk menunjang pembangunan negara. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo maka semakin tinggi juga kemauan mereka untuk membayar pajak. Meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan mereka dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi yang positif terhadap pajak.

Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan cara pandang wajib pajak terhadap pentingnya pembayaran pajak itu sendiri. Jika seseorang memandang bahwa pembayaran pajak itu penting, maka ia akan berperilaku patuh dalam kewajiban perpajakannya, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini sesuai dengan teori atribusi. Teori atribusi mengasumsikan bahwa individu akan menggunakan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan implikasinya pada tindakan mereka. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan arah positif yang berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak membayar pajak, maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Fikriningrum dan Winda (2012); Hardiningsih dan Pancawati (2011); Setyonugroho (2012); Permadi dan Tedi (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak, begitu pula sebaliknya.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki nilai t hitung (2,481) > t tabel (1,986) dengan tingkat signifikan sebesar $(0,015) < \alpha (0,05)$. Sehingga variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, itu berarti bahwa H_2 diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kemauan mereka dalam membayar pajak.

Hal ini berarti wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi tentang pajak sehingga mereka akan memiliki kemauan yang cukup baik untuk membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya, demi kesejahteraan masyarakat banyak. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga diharapkan akan tercapai unsur keadilan dan kebenaran mengingat bahwa wajib pajak yang terutang. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan diharapkan mampu mendorong kesadaran wajib pajak untuk mau membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Fikriningrum dan Winda (2012); Widayati dan Nurlis (2010); Setyonugroho (2012); Permadi dan Tedi (2013) yang menunjukkan hasil bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Artinya, Tingginya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan hal ini dikarenakan wajib pajak cukup baik memahami dan mengetahui peraturan perpajakan. Semakin paham dan mengerti wajib pajak akan peraturan perpajakan akan semakin meningkatkan kemauan membayar pajak.

Pengaruh Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan sebesar 2,494 > t tabel (1,986) dengan tingkat signifikansi sebesar $(0,014) < \alpha (0,05)$. Sehingga variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, itu berarti bahwa H_3 diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan maka semakin tinggi kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah memiliki persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak. Persepsi yang baik sehubungan dengan fektivitas sistem perpajakan akan muncul apabila fiskus menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang kemudahan akses yang didapat oleh wajib pajak serta memberikan kenyamanan bagi wajib pajak sehingga akan mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan. Persepsi yang baik akan memberikan pengaruh yang baik khususnya kepada wajib pajak. Semakin baik persepsi atas efektifitas sistem perpajakan maka semakin tinggi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010); Fikriningrum dan Winda (2012) yang menyatakan bahwa variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini juga diperkuat oleh hasil penelitian peenliti lainnya yang menemukan hasil bahwa variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Arah positif ini dimaksudkan bahwa semakin baik persepsi yang diberikan wajib pajak terhadap efektifitas sistem perpajakan maka semakin besar pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini karena wajib pajak cukup baik mengetahui tentang sistem pajak yang baru secara online. Semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kemauan mereka dalam membayar pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel kualitas pelayanan sebesar 2,896 > t tabel (1,986) dengan tingkat signifikansi sebesar $(0,005) < \alpha (0,05)$. Sehingga variabel kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, itu berarti H4 diterima. Kualitas pelayanan perpajakan sangat menunjang halnya dalam sistem pemungutan pajak. Dalam hal ini fiskus sangat berperan aktif sehubungan dengan terselenggaranya kualitas pelayanan yang memadai yang diberikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak. Dengan adanya pelayanan yang berkualitas dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat khususnya wajib pajak ditunjang dengan fasilitas fisik yang memadai, fiskus yang memiliki SDM yang sudah terlatih, sistem informasi perpajakan yang prima bagi wajib pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan pihak KPP Pratama Sukoharjo kepada responden maka kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak juga semakin tinggi.

Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.^[4] Apabila ketentuan perpajakan dibuat secara singkat dan sederhana, mudah dipahami wajib pajak, maka pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga keseluruhannya akan menghasilkan pelayanan perpajakan dengan kualitas yang semakin baik kedepannya.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Fikriningrum dan Winda (2012); Hardiningsih dan Pancawati (2011); Setyonugroho (2012) yang menemukan hasil bahwa kualitas layanan signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Artinya, semakin baik pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin meningkatkan kemauan membayar pajak. Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara mendengar, mencari tahu dan berupaya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Manfaat Pajak yang Dirasakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel persepsi wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan sebesar 2,536 > t tabel (1,986) dengan tingkat signifikansi sebesar $(0,013) < \alpha (0,05)$. Sehingga variabel persepsi wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, itu berarti H5 diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan maka semakin tinggi kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sadar bahwa pajak yang mereka berikan dengan sukarela kepada Negara sangat bermanfaat bagi banyak orang dan wajib pajak dapat merasakan manfaat yang mereka peroleh selama ini dimana fasilitas, sarana dan prasarana pembangunan yang semakin bagus dan lancar sudah sedikit demi sedikit nyata hasilnya dan bermanfaat bagi banyak orang dan memperlancar aktivitas sehari-hari wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Ramadhani (2014) yang juga menemukan hasil bahwa persepsi wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Semakin banyak manfaat yang wajib pajak rasakan maka semakin tinggi kemauan mereka dalam membayar pajak, begitu pula sebaliknya.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum sebesar 3,049 > t tabel (1,986) dengan tingkat signifikansi sebesar $(0,003) < \alpha (0,05)$. Sehingga variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, itu berarti H6 diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum maka kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak juga semakin tinggi. Kepercayaan terhadap sistem

pemerintahan dan hukum akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak apabila dana yang didapat dari pemungutan pajak tersebut di distribusikan merata untuk membiayai segala keperluan dan pengeluaran negara. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan nantinya akan kembali ke masyarakat. Kepercayaan wajib pajak kepada pemungut pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak karena tingkat kepercayaan ini akan membentuk motivasi dan komitmen individu. Individu yang memiliki persepsi, bahwa negara dapat dipercaya maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat, demikian juga dengan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang tercermin dari kemauan untuk membayar pajak. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang tinggi memicu munculnya komitmen yang kuat dan taat terhadap peraturan yang ada, termasuk dalam perpajakan (Pratomo, 2015) Sistem pemerintahan dan hukum yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, sehingga kesadaran perpajakan pada masyarakat akan tinggi dan akhirnya mendorong meningkatnya kemauan membayar pajak (Fahluzy dan Septian, 2014).

Di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dan lain-lain. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis (Handayani dan Sapti, 2012).

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Ramadhani (2014); Pratomo (2015); Fahluzy dan Septian (2014); Prahestiara (2014) yang menemukan hasil bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam membayar pajak. Artinya, semakin baik sistem pemerintahan dan hukum maka semakin meningkatkan kemauan membayar pajak. Jika masyarakat tidak percaya pada mekanisme pemerintahan, maka kesadaran membayar pajak juga akan rendah. Demikian pula jika masyarakat tidak mendapatkan laporan penggunaan pajak mereka dengan transparan, maka masyarakat juga akan enggan untuk melakukan pembayaran atas pajak.

5. PENUTUP

Berdasarkan uji parsial, faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, persepsi wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas sehingga masih banyak faktor lain diluar penelitian ini yang dapat meningkatkan kemauan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dalam membayar pajak. Peneliti menyarankan bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi sistem pelayanan, sistem perpajakan dan peraturan-peraturan perpajakannya yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo diharapkan semakin meningkatkan kemauannya untuk membayar pajak dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan semakin memperluas penelitian dengan melakukan penelitian pada beberapa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama tidak hanya di kabupaten sukoharjo namun di luar kabupaten sukoharjo dan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sehingga memungkinkan dapat mempengaruhi kualitas penelitian yang jauh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, S & Rahayu, S. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana. Jakarta.
- Fahluzy, Septian Fahmi dan Linda Agustina. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal* 3 (3): 399-406.
- Fikriningrum, Winda Kurnia dan Muchamad Syafruddin. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-15.
- Handayani, Sapti Wuri dan Agus Faturokhman Umi Pratiwi. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Artikel Ilmiah*. Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 1 Nopember 2011, Hal: 126 – 142.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Permadi, Tedi Permadi, Azwir Nasir dan Yuneita Anisma. 2013. Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Jurnal Ekonomi* Volume 21, Nomor 2 Juni 2013.
- Prahestiara, Osydhia Eka. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Pada Kpp Pratama Salatiga. *Naskah Publikasi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Pratomo, Alloysius Brian. 2015. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Persepsi, Tingkat Kepercayaan Terhadap Kemauan Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur.
- Ramadhani, Fitriana. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Artikel Publikasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi kelima*. Salemba Empat. Jakarta.
- Setyonugroho, Hariyadi. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pada Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. *Artikel Ilmiah*. STIE Perbanas. Surabaya.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Utami, S.R., Andi, dan Soerono, A.N. 2012. ‘Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang’. *Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin*.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia Edisi 8*. Salemba Empat. Jakarta.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga). *SNA XIII Purwokerto*
- Wulandari, Rika. 2012. Sistem Perhitungan serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Layanan Jasa Paketpos & Weselpos pada PT Pos Indonesia (PERSERO) Malang. *Tugas Akhir*. Jurusan Akuntansi Progm Diploma Ak. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Malang.
- Z.Probondari, Ryanni. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. *Artikel Ilmiah*. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.